

**EVALUASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
POLITIK DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi publik**



**Oleh :**

**SITI APRIDINA ANGGRAINI**

**0701181621051**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK DI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

SITI APRIDINA ANGGRAINI  
07011181621051

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 19 Juni 2020

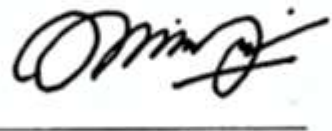
Pembimbing I

Drs. Joko Siswanto, M.Si  
NIP. 195706051985031004

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joko Siswanto', written over a horizontal line.

Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zailani Surya Marpaung', written over a horizontal line.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Agustus 2020.

Indralaya, 11 Agustus 2020

Ketua

1. Drs. Joko Siswanto, M.Si.  
NIP. 195706051985031003



.....

Anggota

2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



.....

3. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002



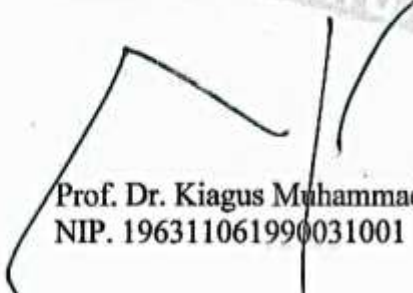
.....

4. Dr. Nurmah Semil, M.Si.  
NIP. 196712011992032002




.....

Mengetahui,  
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Meskipun rasa takut gagal begitu besar, jangan lupa sisakan rasa percaya dan keyakinan untuk melawannya. Jika tidak begitu, kita tidak akan tahu seberapa indahnyanya dari setiap usaha dan takdir tersebut menyatu”**

**(Siti Apridina Anggraini)**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :**

- 1. Kedua Orang Tua Saya, Bapak Arif Sumarna dan Ibu Rini Novianti.**
- 2. Ayuk Saya Siti Mariani Agustina**
- 3. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI.**
- 4. Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2016.**
- 5. Almamater Kebanggaan Saya.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan berkat, rahmat, hidayah dan Karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan”**.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing, memberikan ilmu, nasehat dan saran kepada penulis hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing saya selama melaksanakan studi kuliah;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama melaksanakan studi kuliah;
7. Bapak H. Bakhnir Rasyid, SE.,MM.,M.Si selaku Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian;
8. Bapak Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si selaku Kepala Bidang Politik, Bapak Erwin Alfian, SH selaku Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan dan Pendidikan Politik, Bapak Irwan Ridwan selaku Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu, ialah sebagai *informan* yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan hingga menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh pihak pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terutama Bidang Politik yang telah membantu sejak penulis melakukan Kuliah Kerja Administrasi hingga menyelesaikan penulisan skripsi;
10. Seluruh *Informan* yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Orang tua saya, Arif Sumarna dan Rini Novianti yang selalu mendoakan, memberi ridho, memberikan semangat juga dukungan, dan berjuang dalam segi moril maupun materil;
12. Ayuk saya Siti Mariani Agustina, Kakek saya Abdullah Musa, BA dan Keluarga Besarku tersayang yang selalu menghibur, memberikan bantuan, dorongan semangat, dan kepercayaan kepada penulis;
13. Sahabat-sahabat saya Melda, Faizah, Wiwik, Ranti, Sita, dan Habibie yang telah menemani dalam suka duka, mendengar curahan hati, memberikan solusi, menghibur ketika merasa gundah, dan yang sedia memberi bantuan tiada habisnya kepada penulis dalam proses penulisan skripsi;

14. Sahabat-sahabat saya di Kampus Indralaya Najat, Rattu, Elsa dan di Kampus Palembang, Aji dan Messy yang melewati masa perkuliahan bersama dengan suka duka, menemani dan menikmati keseruan tiada habisnya sampai akhir menyelesaikan masa studi perkuliahan;
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 yang telah bersama-sama menempuh masa perkuliahan.
16. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik (HIMARA) yang memberikan pengalaman dan menjadi wadah dalam mengembangkan potensi diri.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kelemahan, kekurangan maupun suatu kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaiki kesalahan Skripsi ini untuk kedepannya.

Palembang, September 2020


Penulis

## ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Dilatarbelakangi dengan belum lancarnya konsultasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi muda. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan atau model evaluasi yang dikembangkan oleh Leo Agustino yaitu Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana prasarana dan teknologi, Finansial, dan Regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik, namun belum memenuhi kriteria kelembagaan dari Leo Agustino, karena masih adanya hambatan pada konsultasi antar lembaga. Pada penelitian ini menyarankan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pendidikan politik bagi generasi muda dengan Kesbangpol Kabupaten dan mengajukan rencana program yang bisa melaksanakan kegiatan gabungan antar lembaga di tingkat Kabupaten.

**Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Fasilitasi, Pendidikan Politik.**

**Pembimbing I**



**Drs. Joko Siswanto, M.Si**  
**NIP. 195706051985031003**

**Pembimbing II**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

**Indralaya, Agustus 2020**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**




**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

## ABSTRACT

*Evaluation of the Policy on the Implementation of Facilitation for the Implementation of Political Education at the National and Political Unity Agency of South Sumatra Province. This is motivated by the lack of smooth consultation between institutions in the implementation of political education for the younger generation. This thesis aims to find out how the Implementation of Facilitation for the Implementation of Political Education in the National and Political Unity Agency of South Sumatra Province. This type of research is descriptive with qualitative methods. Data collection was done by using observation, interview and documentation techniques. The theory used in this research is to use the approach or evaluation model developed by Leo Agustino, namely Apparatus Resources (SDA), Institutions, Infrastructure and Technology, Finance, and Regulation. The results showed that the implementation of the Facilitation for the Implementation of Political Education at the National and Political Unity Agency of South Sumatra Province was good enough, but did not meet the institutional criteria of Leo Agustino, because there were still obstacles to inter-institutional consultations. This research suggests that the National Unity and Political Body of South Sumatra Province carry out political education for the younger generation with the District Kesbangpol and propose a program plan that can carry out joint activities between institutions at the district level.*

**Keywords: Policy Evaluation, Implementation, Facilitation, Political Education.**

**Advisor I**



**Drs. Joko Siswanto, M.Si**  
**NIP. 195706051985031003**

**Advisor II**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

**Indralaya, August 2020**  
**Chaiman of The Public Administration Department**  
**Faculty of Social and Political Science**  
**Sriwijaya University**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP. 198108272009121002**



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
1. Kebijakan Publik .....	12
2. Evaluasi Kebijakan.....	13
B. Model Evaluasi yang digunakan .....	15
C. Fasilitasi.....	17
D. Pendidikan Politik .....	18
E. Penelitian Terdahulu.....	19
F. Kerangka Pemikiran .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Definisi Konsep.....	23
C. Fokus Penelitian .....	23
D. Unit Analisis Data .....	24
E. Jenis Data dan Sumber Data.....	24
1. Jenis Data .....	24
2. Sumber Data .....	25
F. Informan Penelitian .....	25

G. Teknik Pengumpulan Data .....	26
H. Teknik Analisis Data .....	27
I. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
1. Sejarah Singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumsel .....	30
2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumsel.....	30
3. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumsel.....	31
4. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumsel .....	33
B. Analisis Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.....	48
1. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	49
2. Kelembagaan .....	52
3. Sarana, Prasarana dan Teknologi .....	56
4. Finansial .....	59
5. Regulasi .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase IDI Sumsel Tahun 2009-2018 .....	2
2. Penyelenggaraan Pendidikan Politik Masyarakat di Provinsi Sumsel Tahun 2014-2018 .....	6
3. Penyelenggaraan Pendidikan Politik Generasi Muda Tahun 2017-2019.....	7
4. Daftar Nama Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan .....	9
5. Penelitian Terdahulu .....	19
6. Fokus Penelitian .....	26
7. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang .....	48
8. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
9. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	48
10. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Agama.....	49
11. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan .....	49
12. Muatan Materi dan Kriteria Narasumber/Pemateri.....	51
13. Narasumber/Pemateri Penyelenggaraan Pendidikan Politik.....	53
14. Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Tahun 2018 .....	62
15. Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Tahun 2019 .....	63
16. Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda .....	63
17. Petunjuk Teknis (Juknis) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Tahun 2019 .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran .....	23
2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumsel .....	35
3. Permohonan Narasumber .....	52
4. Dokumentasi Narasumber Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.....	54
5. Dokumentasi Pembukaan Diskusi Pendidikan Politik Pemuda, Konsolidasi Bidang Kepemudaan DPD PKS Se-Sumel .....	55
6. Permohonan Fasilitasi Tempat .....	58
7. Permohonan Penjadwalan Kegiatan .....	59
8. Nametag.....	60
9. Souvenir.....	60
10. Dokumentasi Suasana Kegiatan Pendidikan Politik di Gedung Aula Badan Kesbangpol Prov. Sumsel.....	60
11. SK Penunjukan Koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumsel Program Pendidikan Politik Tahun 2016.....	64
12. SK Penunjukan Koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumsel Program Pendidikan Politik Tahun 2016.....	65
13. SK Penunjukan Koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumsel Program Pendidikan Politik Tahun 2016.....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Tugas Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
3. Surat Keputusan Skripsi
4. Kartu Bimbingan Seminar Proposal
5. Lembar Revisi Seminar Proposal
6. Surat Izin Penelitian
7. Kartu Bimbingan Skripsi
8. Lembar Revisi Skripsi
9. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
10. Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda
11. Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
12. Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017
13. Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

<i>Civil liberty</i>	: Kebebasan Sipil
<i>Cost-benefit analisis</i>	: Analisis Manfaat Biaya
<i>Double</i>	: Dua Kali Lipat
<i>Evidence Based</i>	: Kejadian
<i>Fasilitation</i>	: Fasilitas
<i>Forum Grup Discussion</i>	: Forum Diskusi Kelompok
<i>Institution od Democracy</i>	: Lembaga-lembaga Demokrasi
<i>Interactive</i>	: Suatu Hal yang Saling Aktif
<i>Interview</i>	: Wawancara
<i>Make a Match</i>	: Mencocokkan
<i>Mass Rapid Transportation</i>	: Kereta Rel Listrik
<i>Mind Mapping</i>	: Peta Pemikiran
<i>Output</i>	: Keluaran
<i>Political Rights</i>	: Hak-hak Politik
<i>Portofolio</i>	: Kumpulan Dokumen
<i>Stakeholders</i>	: Pemangku Kepentingan
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BAPPEDA	: Badan Pendapatan Daerah
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DIKLAT	: Pendidikan dan Pelatihan
DIKNAS	: Dinas Pendidikan
DPD PKS	: Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera
FISIP	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FKIP	: Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan
HAM	: Hak Asasi Manusia
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
IPM	: Ikatan Pelajar Mahasiswa
JUKLAK	: Petunjuk Pelaksana
JUKNIS	: Petunjuk Teknis
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
MRT	: Mass Rapid Transporatation
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
OSIS	: Organisasi Siswa Intra Sekolah
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEMILU	: Pemilihan Umum
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri

PILKADA	: Pemilihan Kepala Desa
PKN	: Pendidikan Kewarganegaraan
PMR	: Palang Merah Remaja
PPTK	: Penunjukan Koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RENSTRA	: Rencana Strategis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEKDA	: Sekretaris Daerah
SK	: Surat Keputusan
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia ialah Negara demokrasi, sejak 17 Agustus 1945 Indonesia merupakan negara demokratis seperti yang tertulis dalam pasal 1 UUD Indonesia menyatakan negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Negara demokrasi itu terwujud karena negara Indonesia menghormati hak-hak asasi manusia dalam memberikan rakyat Indonesia suara, untuk memilih aturan Indonesia dengan baik dan benar. Dengan adanya pemilihan-pemilihan kepala desa maupun pemilihan umum, dimana yang dipilih adalah rakyat Indonesia sendiri untuk mewakili rakyat Indonesia dalam mengatur tatanan pemerintah Indonesia dan sistem negara Indonesia itu sendiri.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mewujudkan partisipasi demokrasi dalam suatu pemilu yaitu melalui berbagai cara agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang masih awam dalam dunia politik, salah satunya dengan memberikan suatu kegiatan pendidikan politik di kalangan masyarakat.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat pencapaiannya tersebut diukur berdasarkan suatu pelaksanaan dan perkembangan dalam tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Adapun metode yang didapatkan dari penghitungan



IDI yaitu menggunakan empat sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), *Focus Grup Discussion* (FGD), dan wawancara mendalam.

**Tabel 1. Persentase IDI Sumsel tahun 2009-2018**

No.	Tahun	Persentase IDI Sumsel	Kategori
1.	2009	75,52	Sedang
2.	2010	73,65	Sedang
3.	2011	67,92	Sedang
4.	2012	73,17	Sedang
5.	2013	67,12	Sedang
6.	2014	78,42	Sedang
7.	2015	79,81	Sedang
8.	2016	80,95	Baik
9.	2017	74,04	Sedang
10.	2018	77,14	Sedang

*Sumber : Diolah Penulis dari Website BPS Sumsel*

Berdasarkan dari tabel di atas bahwa Perkembangan IDI Sumsel dari 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumsel 2017 sebesar 74,04 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 6,91 poin dibandingkan dengan IDI Sumsel 2016 sebesar 80,95. Dengan adanya penurunan ini, tingkat demokrasi di Provinsi Sumsel kembali menjadi kategori “sedang” dimana pada tahun 2016 sudah berada pada kategori “baik”.

Kemudian pada IDI Sumsel tahun 2018 sebesar 77,14 dari skala 0 sampai 100 yang masih mendapatkan kategori “sedang” serta mengalami kenaikan sebesar 3,10 poin dibandingkan tahun 2017 sebesar 74,04 meskipun masih terbilang mengalami penurunan dari tahun 2016 tersebut yang berada kategori “baik”.

Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi Indonesia. IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi tersebut. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Adapun beberapa solusi pemerintah dalam mencerdaskan bangsa terutama generasi muda yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik. Pendidikan politik ialah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah saja, sehingga masyarakat masih ada yang dibodohi atau diberikan janji-janji yang hanya omongan saja, padahal dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk.

Dalam pencegahannya agar tidak terulang kembali, maka dari itu diberikanlah pendidikan politik kepada masyarakat dalam segala kalangan usia diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Bukan hanya tertera pada UU saja atau hanya menjadi program-program diatas kertas tanpa realisasi bagi partai politik dan pemerintah.

Untuk mewujudkan suatu tujuan agar dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, juga berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan terutama generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Permendagri No 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik sebagai landasan utama dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan fasilitasi pendidikan politik.

Selain itu, pendidikan politik bagi generasi muda juga diintruksikan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda bahwa mereka sebagai penerus cita-cita bangsa Indonesia perlu diberikan pendidikan politik untuk mengetahui norma, nilai, tata cara, dan aturan dalam kehidupan politik bangsa, dalam arti tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan

berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pada Permendagri No 36 Th 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang menimbang :

- a) Bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban dalam mengembangkan kehidupan demokrasi;
- b) Bahwa untuk pengembangan kehidupan demokrasi diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Adapun tujuan pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik pada Pasal 2 yaitu seperti :

- a) Memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; dan
- b) Memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.

Kemudian adapun Sasaran dari fasilitasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan politik pada Pasal 3 yaitu :

- a) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan

- c) Meningkatkan dalam perkembangan karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Kegiatan dalam pelaksanaan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik pada

Bab IV, Pasal 6 ialah seperti berikut :

- a) Seminar dan lokakarya;
- b) Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c) Asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
- d) Pagelaran seni dan budaya;
- e) Jambore, perkemahan, napak tilas; dan
- f) Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

Kelompok sasaran penyelenggaraan pendidikan politik pada Pasal 7 yaitu meliputi :

- (1) Kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:
  - a) Partai politik;
  - b) Partai politik lokal;
  - c) Organisasi kemasyarakatan;
  - d) Lembaga nirlaba lainnya; dan
  - e) Lembaga atau instansi vertikal di daerah.
- (2) Partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan partai politik di daerah yang berbadan hukum.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan organisasi yang berbadan hukum.
- (4) Lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan lembaga yang tidak berbadan hukum tetapi memenuhi asas legalitas.
- (5) Lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain berbentuk:

- a) Badan eksekutif mahasiswa;
- b) Dharma wanita;
- c) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- d) Pondok pesantren;
- e) Paguyuban atau sejenisnya;
- f) Rukun tetangga;
- g) Rukun warga;
- h) Karang taruna; dan
- i) Kelompok swadaya masyarakat lainnya.

(6) Lembaga atau instansi vertikal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu instansi pusat yang berada di daerah dan merupakan bagian dari kementerian/lembaga.

Adapun Data Pendidikan Politik yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2. Penyelenggaraan Pendidikan Politik Masyarakat di Provinsi Sumsel Tahun 2014-2018**

No.	Kegiatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat	1	2	1	1	1
2	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol	5	3	1	1	1
3	Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat	2	4	2	1	2
Jumlah		8	9	4	3	4

*Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumsel*

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Namun penyelenggaraan pendidikan politik oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan selama ini yang salah satu sasarannya ialah mahasiswa maupun pelajar hanya dihadiri oleh peserta Perguruan Tinggi ataupun

sekolahnya yang bertempat tinggal di Kota Palembang saja. Salah satu penyelenggaraan pendidikan politik tersebut dapat dilihat dari peserta yang hadir di kegiatan itu, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3. Penyelenggaraan Pendidikan Politik Generasi Muda Tahun 2017-2019**

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pembinaan Pemahaman Pendidikan Politik Bagi ORMAS Perempuan Tahun 2017	28 September 2017	40 Orang yang terdiri dari Ormas dan perwakilan dari sekolah yang ada di Palembang.
2.	Pembekalan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	13 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Palembang.</li> <li>2. Perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang.</li> <li>3. Perwakilan dari SMA IBA Palembang.</li> <li>4. Perwakilan dari SMA Negeri 1 Palembang.</li> <li>5. Perwakilan dari SMA Negeri 15 Palembang.</li> <li>6. Perwakilan dari SMA Negeri 3 Palembang.</li> <li>7. Perwakilan dari SMA Negeri 6 Palembang.</li> <li>8. Perwakilan dari SMA Pembina Palembang.</li> <li>9. Perwakilan dari SMA Pusri Palembang.</li> <li>10. Perwakilan dari SMK Bina Jaya Palembang.</li> <li>11. Perwakilan dari SMK Muhammadiyah 2 Palembang.</li> <li>12. Perwakilan dari SMK Negeri 3 Palembang.</li> <li>13. Perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Palembang.</li> <li>14. Perwakilan dari Universitas Taman Siswa Palembang.</li> <li>15. Perwakilan dari FASILKOM Universitas Sriwijaya.</li> </ol>
3.	Pendidikan Politik dan Etika	30 Juli 2019	1. Perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2

	Budaya Politik		Palembang. 2. Perwakilan dari SMA Negeri 1 Palembang. 3. Perwakilan dari SMA Negeri 3 Palembang. 4. Perwakilan dari SMA Negeri 4 Palembang. 5. Perwakilan dari SMA Negeri Sumsel. 6. Perwakilan dari SMK 5 Palembang. 7. Perwakilan dari SMK Bina Jaya 8. Perwakilan dari SMK Muhammadiyah 2 Palembang. 9. Perwakilan dari SMK Negeri 3 Palembang. 10. Perwakilan dari SMK Pembina 1 Palembang. 11. Perwakilan dari SMK PGRI 1 Palembang. 12. Perwakilan dari SMK Pusri Palembang.
--	----------------	--	---

*Sumber : Laporan Hasil Kegiatan Pendidikan Politik Bidang IV Politik Badan Kesbangpol Prov. Sumsel*

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat salah satu kegiatan pendidikan politik pada tahun 2017-2019 bahwa peserta yang hadir dan menjadi perwakilan setiap sekolah ialah sekolah yang ada di Kota Palembang saja. Padahal, Badan Kesbangpol Provinsi memiliki hak, wewenang dan juga kewajiban untuk mengundang beberapa perwakilan peserta dari berbagai Kab/Kota ataupun menyelenggarakan pendidikan politik di berbagai Kab/Kota. Berikut ini ialah nama Kab/Kota yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan:

**Tabel 4. Daftar Nama Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Nama Kab/Kota	Nama Ibukota
1.	Banyuasin	Pangkalan Balai
2.	Empat Lawang	Tebing Tinggi
3.	Lahat	Lahat
4.	Muara Enim	Muara Enim
5.	Musi Banyuasin	Sekayu
6.	Musi Rawas	Muara Beliti
7.	Musi Rawas Utara	Rupit
8.	Ogan Ilir	Indralaya
9.	Ogan Komering Ilir	Kota Kayu Agung
10.	Ogan Komering Ulu	Baturaja
11.	Ogan Komering Ulu Selatan	Muaradua
12.	Ogan Komering Ulu Timur	Martapura
13.	Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	Talang Ubi
14.	Kota Lubuk Linggau	Lubuk Linggau
15.	Kota Pagar Alam	Pagar Alam
16.	Kota Palembang	Palembang
17.	Kota Prabumulih	Prabumulih

*Sumber : Diolah Penulis pada Website BPKP Prov. Sumsel*

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan politik oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun terakhir ini berupa kegiatan seminar, yang terkadang dilaksanakan satu hari penuh bahkan terkadang hanya setengah hari, dikarenakan terdapatnya beberapa kendala seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain sebagainya.

Pada Permendagri No. 36 tahun 2010, Bab IV pasal 6 yaitu kegiatan fasilitasi yang berupa; seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas, dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini masih ada beberapa kegiatan fasilitasi dalam Pendidikan Politik yang belum diselenggarakan seperti yang tercantum dalam Bab IV pasal 6 tersebut.



Maka dari itu diharapkan agar **“Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan”** bisa menjadi acuan untuk menutupi kekurangan dan memperbaiki hal-hal yang masih belum terselenggara pada fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di Provinsi Sumatera Selatan. Terutama bagi kalangan generasi muda yang sangat membutuhkan lebih banyak pendidikan politik yang akan berdampak pada pemahaman hak dan kewajiban, partisipasi dalam suatu pemilihan, dan setiap warga-warga negara di kehidupan bernegara dan berbangsa dalam suatu tanggung jawabnya masing-masing. Dikarenakan mereka merupakan suatu penerus bangsa, kemudian akan menjadi regenerasi di masa mendatang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: Bagaimana “Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumatera Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis yaitu diharapkan agar bisa memberi sumbangan pikiran berupa informasi-informasi dan ilmu sosial terkhusus Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik maupun Evaluasi Kebijakan Publik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan bagi studi lanjutan maupun studi-studi lain dalam meneliti fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik khususnya pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
- b. Sebagai bahan rekomendasi bagi tiap lembaga-lembaga ataupun aktor-aktor kebijakan publik dalam evaluasi kebijakan publik khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*: Bandung, Penerbit Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*: Bandung, Penerbit CV Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Azhar Susanto. 2004. *Sistem Informasi Manajemen: konsep dan pengembangannya*. Bandung, Penerbit Linggar Jaya.
- Effendi, Sofian. Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*: Jakarta, Penerbit Pustaka LP3ES
- Gie, The Liang. 2006. *Cara Belajar Yang Efektif*: Jakarta, Penerbit Raya Grafindo
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*: Yogyakarta, Penerbit Gava Media
- Kantapwira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*: Bandung, Penerbit Sinar Baru Algensindo
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Penerbit Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*: Jakarta, Penerbit PT Elex Media Komputindo
- Sam, Arianto. 2008. *Pengertian Fasilitas Belajar*. (Online) (<http://sobatbaru.blogspot.com/2008/10/pengertian-fasilitas-belajar.html>). Diakses pada 10 November 2019, Pukul 17.25 WIB
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*: Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo.
- Yatimah, Durotul. 2015. *Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial*. Jakarta.

### SKRIPSI :

- Fajar, Wildan Nurul. 2018. *Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa*. Purwokerto : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Maghfiroh, Fitri. 2017. *Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Nurcholis, Muchamad. 2018. *Proses Sosialisasi dan Pendidikan Politik pada Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi di Kecamatan Pardasuka dan KPUD Pringsewu)*. Lampung : Universitas Lampung

**PERATURAN-PERATURAN :**

Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.  
Undang-undang Dasar 1945

**SUMBER LAIN :**

Rencana Strategis Sekretariat Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan  
(<https://media.neliti.com/media/publications/1123-ID-entingnya-pendidikan-politik-generasi-muda-terhadap-pelaksanaan-partisipasi-poli.pdf>) Diakses pada tanggal 10 November 2019, Pukul 17.30 WIB  
(<https://sumsel.bps.go.id/pressrelease/2019/08/01/466/idi-sumatera-selatan-2018-mengalami-peningkatan-dibandingkan-dengan-idi-sumatera-selatan-2017.html>)  
Diakses pada tanggal 10 November 2019, pukul 20.05 WIB  
(<http://eprints.unisnu.ac.id/1432/2/BAB%20II.pdf>) Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019, Pukul 19.30 WIB  
(<http://rintosusantotempirai.blogspot.com/2014/10/teori-implementasi-kebijakan-publik.html?m=1>) Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018, Pukul 20.05 WIB